

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kinerja pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan terus mengalami peningkatan (BPK, 2017). Namun, kinerja yang baik atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan organisasi tersebut ternyata tidak sejalan dengan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kritikan kepada pemerintah daerah baik dalam bidang pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional (Rini & Damiani, 2017).

Dengan berkembangnya teknologi informasi, pemerintah berupaya meningkatkan kinerjanya melalui penyelenggaraan *e-government* (Nugraha, 2018). Istilah *e-government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh organisasi pemerintahan agar organisasi tersebut menjadi lebih efektif dan transparan. Menurut penelitian Kurniasih et al. (2013) implementasi *e-government* memiliki hubungan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik implementasi *e-government*, maka semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dalam penelitian Beshi dan Kaur (2020) ditemukan bahwa kualitas informasi akuntansi mempengaruhi ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan warga terhadap sektor publik. Oleh karena itu, kualitas informasi akuntansi harus menjadi fokus dari target kinerja organisasi. Kualitas informasi akuntansi didapatkan dari sistem informasi yang efektif dan berkualitas (Fitrios, 2016). Peran sistem informasi akuntansi (SIA) sangat penting dalam mengelola organisasi dan menerapkan sistem pengendalian internal (Onaolapo A

& Odetayo T, 2012). Marshall dan Stainberth (2015) menjelaskan penerapan SIA di organisasi dapat memberi nilai tambah dalam penyediaan informasi keuangan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan organisasi yang akan berdampak pada kinerja keuangan dan non-keuangan organisasi. Beshi dan Kaur (2020) menyatakan bahwa menyediakan SIA yang berkualitas dapat menunjukkan daya tanggap, akuntabilitas, dan transparansi, hal tersebut memiliki hubungan yang signifikan dalam mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik.

Kinerja pemerintah daerah memiliki relevansi dengan ayat Al-Qur'an dan hadits berikut:

Q.S Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّمَا قَوْمٌ مَّعْتَدُونَ ۚ  
تَعَدُّوا ۚ عَدُوًّا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali - kali kebencian terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah:8)

Dalam surat Al-Maidah ayat 8 di atas, Allah berfirman kepada kita sebagai hamba yang beriman untuk bersikap adil karena sifat adil dalam kehidupan sehari-hari karena dapat mendekatkan kita kepada ketakwaan.

HR. Bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْأَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Artinya:

Dari Ibnu Umar Ra dan Nabi SAW sesungguhnya bersabda “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.” (**HR. Bukhari dan Muslim**)

Dalam Hadits Riwayat Bukhari di atas dijelaskan bahwa sebagai umat muslim kita dianjurkan untuk bertanggungjawab terhadap kewajiban kita dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya agar pekerjaan kita membuahkan hasil yang maksimal, salah satunya dengan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Ditengah banyaknya penelitian terkait peran SIA terhadap kinerja, penelitian dari determinan kualitas SIA itu sendiri masih terbatas. Pengembangan SIA sering dilakukan tetapi tidak menciptakan nilai tambah, sehingga diperlukan penelitian mengenai determinan SIA. Menurut Zhang et al. (2014) tata kelola TI dikombinasikan dengan SIA mampu menciptakan keunggulan kinerja. Ini berarti, kualitas SIA dideterminasi oleh tata kelola TI, karena tata kelola TI yang baik akan menciptakan SIA yang berkualitas dan meningkatkan kualitas kinerja. IT *Governance Institute* (ITGI) menjelaskan tata kelola TI merupakan suatu struktur proses dan hubungan untuk mengendalikan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dengan menambahkan nilai serta menyeimbangkan risiko versus pengembalian atas TI dan prosesnya (ITGI, 2003). Secara khusus, Tata kelola TI dapat didefinisikan sebagai kapasitas manajemen puncak untuk mengontrol perumusan dan implementasi strategi TI melalui struktur dan proses organisasi yang menghasilkan perilaku yang diinginkan, yang akan memastikan bahwa inisiatif TI mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi

(Bradley et al., 2012). Oleh karena itu, maka kualitas SIA menjadi pemediasi dari hubungan antara efektivitas tata kelola TI dan kinerja organisasi.

Hingga saat ini riset tentang determinan kualitas SIA serta peranannya terhadap kinerja sudah beberapa kali ditemukan, tetapi dalam konteks pemerintah daerah masih langka. Dalam penelitian Zhang et al. (2014) meneliti kemampuan TI namun belum diuji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melanjutkan *framework* yang dikembangkan Zhang et al. (2014) dalam konteks SIA, karena saat ini SIA sedang berusaha dikembangkan oleh pemerintah, khususnya di Indonesia. Kolaborasi antara efektivitas tata kelola TI dengan kualitas SIA ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

Pengujian variabel kualitas SIA pada penelitian ini menjadi pembeda dengan penelitian Zhang et al. (2014), dimana kualitas SIA diposisikan sebagai variabel *intervening*. Penelitian ini penting dilakukan untuk membentuk model yang utuh, dimana tata kelola TI sebagai determinan dari SIA yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Di sisi lain, dengan berkembangnya zaman, pemerintah daerah perlu memiliki efektivitas tata kelola TI dan kualitas SIA yang baik untuk meningkatkan kinerjanya. Secara ringkas dan eksplisit, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peran efektivitas tata kelola TI terhadap kinerja pemerintah daerah dengan kualitas SIA sebagai variabel pemediasi.

## **B. Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas tata kelola TI berperan positif terhadap kinerja organisasi perangkat daerah?
2. Apakah kualitas SIA berperan positif terhadap kinerja organisasi perangkat daerah?
3. Apakah kualitas SIA memediasi peran efektivitas tata kelola TI terhadap kinerja organisasi perangkat daerah?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menemukan bukti empiris peran efektivitas tata kelola TI terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
2. Untuk menemukan bukti empiris peran kualitas SIA terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
3. Untuk menemukan bukti empiris kualitas SIA memediasi peran efektivitas tata kelola TI terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.

## **C. Signifikansi**

### **1. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan peran efektivitas tata kelola TI dan kualitas SIA dalam menunjang peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah.
- b. Secara literatur penelitian ini dapat memberikan informasi dasar mengenai efektivitas tata kelola TI, kualitas SIA, dan kinerja pemerintah daerah.

- c. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya baik kinerja keuangan maupun non-keuangan dengan memperhatikan efektivitas tata kelola TI dan kualitas SIA.